

Bab I Pendahuluan

I. 1 Latar Belakang

Sejak adanya UU otonomi daerah, kewenangan daerah untuk mengelola keuangannya sendiri semakin besar. Tiap daerah juga dibebaskan untuk mencari sumber pendapatan lain untuk membiayai pengeluaran daerah. Besar kecilnya Belanja Modal akan tergantung pada pendapatan daerah (PAD), maka dari itu pemerintah daerah harus menyesuaikan belanja modalnya dengan mempertimbangkan pendapatan daerah (PAD) yang diterima. Selain itu, Pertumbuhan Ekonomi seharusnya bisa memajukan pembangunan daerah yang nantinya dapat menaikkan pengalokasian belanja daerah.

Setelah berjalan beberapa tahun otonomi daerah, terbukti banyak daerah yang masih belum mandiri selama mengatur keuangannya. Banyak daerah yang masih menginginkan bantuan dari pemerintah pusat yaitu dana perimbangan yang di dalamnya terdapat DAU. Kementerian keuangan mengeluarkan data yang menunjukkan jumlah dana transfer ke daerah selalu menunjukkan adanya kenaikan setiap tahun, hal ini terjadi karena adanya kenaikan kebutuhan belanja daerah, tapi bila diingat kembali tujuan awal adanya otonomi daerah, dependensi daerah terhadap bantuan pusat bukan lagi menjadi tujuan otonomi itu ada.

Jumlah dana dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah tertera pada tabel dibawah :

Tabel I.1 Tabel Fenomena
Laporan Keuangan Pertumbuhan Ekonomi (PE), Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Belanja Modal (BM).

Kabupaten /Kota	Tahun	PE Rp. (000) (X1)	PAD Rp (000) (X2)	DAU Rp (000) (Z)	BM Rp (000) (Y)
Toba Samosir	2014	435,542,246	26,014,430	495,377,257	156,147,145
	2015	455,151,088	30,952,610	506,843,572	154,106,801
	2016	476,910,546	54,391,304	537,940,690	181,212,965
	2017	500,570,717	54,840,824	528,490,802	199,230,031
Tebing	2014	308,417,207	74,515,273	385,030,433	163.582.124

Tinggi	2015	323,529,989	82,410,054	400,236,724	158.487.242
	2016	340,074,917	94,058,491	432,437,231	203.355.262
	2017	357,550,522	113.222.875	423.310.733	184.156.162
Dairi	2014	515,382,626	53,525,854	532,723,259	155.712.106
	2015	541,374,865	28,791,848	560,602,194	180.098.060
	2016	568,845,093	68,003,241	623,702,235	219.941.206
	2017	596,877,408	128.489.751	612.745.792	260.705.969

Sumber: BPS Sumatera Utara, 2017

Menurut tabel 1.1 tersebut Pertumbuhan Ekonomi pada tahun 2014 di kabupaten Toba Samosir sebesar Rp 435.542.246 sedangkan pada tahun 2015 sebesar Rp 455.151.088 mengalami kenaikan sebesar Rp 19.608.842 tetapi belanja modal tahun 2014 sebesar Rp 156.147.145 sedangkan pada tahun 2015 sebesar Rp 154.106.801 mengalami penurunan sebesar Rp 2.040.344.

Pendapatan Asli Daerah pada tahun 2014 di kota Tebing Tinggi sebesar Rp74.515.273 sedangkan tahun 2015 sebesar Rp 82.410.054 mengalami kenaikan sebesar Rp7.894.781 tetapi belanja modal tahun 2014 sebesar Rp 163.582.124 sedangkan tahun 2015 Rp 158.487.242 mengalami penurunan sebesar Rp 5.094.882.

Dana Alokasi Umum pada tahun 2016 di kabupaten Dairi sebesar Rp 623.702.235 sedangkan di tahun 2017 sebesar Rp 612.745.792 mengalami penurunan sebesar Rp10.956.443 tetapi belanja modal pada tahun 2016 sebesar Rp219.941.206 sedangkan 2017 sebesar Rp 260.705.969 mengalami kenaikan sebesar Rp 40.764.763.

I.1 Rumusan Masalah

Menurut uraian yg telah dijabarkan, masalah yg akan diteliti dlm penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengalokasian belanja modal dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi pada pemerintah kota/kab di Sumatera Utara?
2. Bagaimana pengalokasian belanja modal dipengaruhi oleh pendapatan asli daerah pada pemerintah kota/kab di Sumatera Utara?
3. Bagaimana pengalokasian belanja modal dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi dan PAD pada pemerintah kota/kab di Sumatera Utara ?

4. Bagaimana pengalokasian belanja modal dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi dan PAD dengan DAU sebagai pemoderasi pada pemerintah kota/kab di Sumatera Utara ?

I.2 Tinjauan Pustaka

I.3.I Pertumbuhan Ekonomi

Menurut Sukirno (2010:9) Pertumbuhan Ekonomi terjadi karena berkembangnya kegiatan produksi berupa barang ataupun jasa yg disebabkan oleh kegiatan yg dilakukan masyarakat. Penelitian oleh Taiwo dan Abayomi (2011) dalam Gede dan Dwirandra (2013) mendapatkan hasil hubungan positif antara PE dengan BM. Jika PE meningkat diikuti oleh pendapatan daerah yg meningkat juga, seharusnya dapat meningkatkan belanja modal juga. Menurut Wulandari dkk (2013) dalam Adyatma dan Meita (2015) menemukan bukti empiris tentang PE yg berpengaruh positif terhadap BM sedangkan menurut Nurdiwaty dkk (2017) PE tidak mempengaruhi pengalokasian belanja modal secara signifikan.

1.3.2 Pendapatan Asli Daerah

Menurut Aries Djaenuri (2012:88) PAD adalah penerimaan yg didapat dari sumber yg berasal dari wilayah itu sendiri dimana pemungutannya harus berdasar pada peraturan daerah yg selaras dengan undang-undang yang ada..

Menurut penelitian Jaya dan Dwiranda (2012) dikatakan PAD mempengaruhi BM secara positif dan signifikan. Ini menandakan bahwasanya besar kecilnya PAD merupakan faktor penting dalam penentuan BM. Menurut Kusnandar dan Siswantoro (2012) dalam Pramesti dkk (2015) hasil penelitian menunjukkan PAD mempengaruhi secara positif dan signifikan pada BM sedangkan menurut Mentayani dan Rusmanto (2013) di dalam Suryani dan Pariani (2018) menyatakan PAD tidak mempengaruhi pengalokasian belanja modal secara signifikan.

I.3.3 Dana Alokasi Umum

DAU adalah dana yang alokasinya bertujuan untuk meratakan kompetensi keuangan daerah dalam membiayai kebutuhan daerah dalam terlaksananya desentralisasi dimana dana tersebut bersumber dari APBN (UU Nomor 33 Tahun 2004).

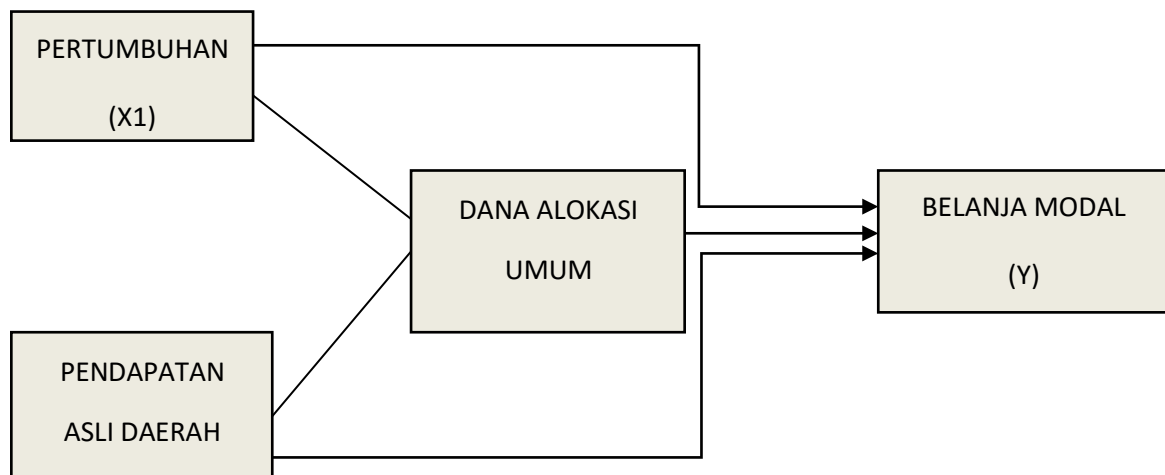
Menurut penelitian Pradita (2013) dalam Novianto dan Dkk (2015) menyatakan DAU mempengaruhi secara positif terhadap belanja modal. Peningkatan jumlah DAU akan meningkatkan pengalokasian belanja modal. Menurut Ardhani (2011) dalam Wibisono dan Wildaniati (2016) menunjukkan DAU mempengaruhi belanja modal dan signifikan. Sedangkan menurut Oktora dan Pontoh (2013) dalam Nurin Hidayati (2016) menyatakan DAU berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal.

I.3.4 Belanja Modal

Menurut Halim (2014:229) BM adalah pembiayaan berupa pengeluaran yang mendukung terlaksananya kegiatan pengadaan, pembelian ataupun penyedia asset tetap yang berguna lebih dari satu tahun yang diterapkan bagi infrastruktur dan penyedia fasilitas publik.

Menurut Megawati (2013) dalam Wibisono dan Wildaniati (2016) menyimpulkan PE, PAD, DAU secara individual dan simultan mempengaruhi anggaran belanja modal. Hal yang paling mempengaruhi secara dominan terhadap anggaran belanja modal adalah PE.

I.3 Kerangka konseptual Gambar



H1 : Pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap belanja modal pada kabupaten/kota di sumatera utara.

H2 : Pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap belanja modal pada kabupaten/kota di sumatera utara.

H3 : Dana alokasi umum berpengaruh terhadap belanja modal pada kabupaten/kota di sumatera utara.

H4 : Variabel independen berpengaruh terhadap belanja modal pada kabupaten/kota di sumatera utara.